

## ABSTRAK

Peranan Kepolisian dalam melakukan Penyidikan harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Penyidik Polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana, akibat sering terjadinya tindakan yang di luar prosedur mengakibatkan salah tangkap dengan sebutan *error in persona* ini bermula dari kesalahan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban Penyidik Polri yang melakukan tindakan diluar prosedur terhadap korban salah tangkap dan implementasi hak asasi manusia dalam perlindungan korban salah tangkap.

Metode pendekatan ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undang.

Adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan Penyidik Polri sehingga terjadinya salah tangkap perlu adanya perlindungan dan dilakukan pemulihan, karena korban salah tangkap juga pasti banyak mengalami kerugian baik secara materi maupun non-materi (fisik, psikis, dan lain-lain). Pemulihan dan perlindungan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban, Penyidik Polri, Salah Tangkap, Hak Asasi Manusia.

## **ABSTRACT**

*The role of the police in conducting investigations must be in accordance with the regulations that require discipline in carrying out their duties in accordance with the mission that they live always have internal rules in order to improve performance, professionalism, organizational culture and to ensure the maintenance of order and implementation of duties according to the objectives, roles, functions, authority and responsibility. Police investigators who try to get information often do inhuman ways such as torturing suspects, even forcing suspects to admit that occur outside the procedure resulting in wrong arrest as an error in person. The mistake of investigation carried out by the investigator.*

*The purpose of this study is to find out and understand the accountability of Indonesian police investigators who take actions outside the procedure for victims of wrongful arrest and the implementation of human rights in the protection of victims of wrongful arrests.*

*This approach method, is a normative juridical approach, which is a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. The material examined in the study of normative law is literature or secondary data. This study uses secondary data, by studying and studying the principles of law, especially positive legal rules derived from library materials, laws and regulations.*

*There is a violation of the procedures carried out by the national police investigator so that the occurrence of wrongful arrests requires protection and recovery, because victims of wrongful arrests must also suffer many material and non-material loss (physical, psychological, etc). Such recovery and protection have been regulated in the criminal procedure code and law number 39 of 1999 concerning human right.*

**Keywords: Responsibility, Police Investigation, Wrong Catch, Human Rights.**